



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

Jl. IMAM BONJOL -KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TELP/FAX.(0737) 71636

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 telah kami selesaikan dengan baik. Laporan ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Perikanan untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang baik (*good government*). Laporan ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terhadap pelaksanaan tujuan, sasaran dan kebijakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021 ini berhasil kami selesaikan sesuai jadwal dengan segala upaya yang ada semaksimal mungkin, akan tetapi kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pihak-pihak terkait sangat kami butuhkan guna penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021 kami buat dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Mukomuko, Maret 2022


Kepala Dinas,

JUNAIDI, SP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690621 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Uraian Singkat Organisaasi	5
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah terpilih	19
2.2 Tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Perikanan	21
2.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program	23
2.4 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	36
3.2 Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja	38
3.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	66
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Jumlah dan Golongan	16
Tabel 2	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Esselon	16
Tabel 3	Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS	17
Tabel 4	Jumlah Pegawai Yang telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan	17
Tabel 5	Produk Domestik Regional Bruto Dinas Perikanan Tahun 2016-2020	24
Tabel 6	Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Per 31 Desember 2021	25
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021	25
Tabel 8	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021	26
Tabel 9	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021	27
Tabel 10	Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021	31
Tabel 11	Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko (APBD-P) Tahun Anggaran 2021	39
Tabel 12	Evaluasi dan Analisis Kinerja (APBD-P) Tahun Anggaran 2021	47
Tabel 13	Perbandingan Realisasi dengan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Menurut APBD-Perubahan	59
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan tahun-tahun lalu	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar Pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro growth* (pertumbuhan). Ditinjau dari perkembangan ekonomi sektoral serta perannya, pada triwulan IV tahun 2021 sektor kelautan dan perikanan secara umum dapat dilihat perkembangannya 4,55 persen.

Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, terwujudnya tata pemerintah yang baik / *good governance* menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pelaporan mempunyai arti penting sebagai salah satu tahapan manajemen untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2010 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategis yaitu berupa keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan target kinerja yang telah disepakati.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Sedangkankan sasaran sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan kinerja instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mukomuko tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah No 9 Tahun 2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;
19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko (LKjIP) Tahun 2021 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggaraan tugas pemerintah;
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam usaha mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko; dan

3. Mengevaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai suatu sasaran di Tahun Anggaran 2021.

1.4 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko. Disebutkan dalam pasal 8 Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan termasuk dalam salah satu program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Mukomuko dalam memajukan pembangunan daerah. Dinas Perikanan dalam meningkatkan pembangunan daerah bertugas melakukan peningkatan produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Mukomuko yang diarahkan untuk ikut serta menciptakan perekonomian rakyat yang lebih tangguh dan mandiri melalui kegiatan Identifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi pada daerah-daerah yang potensi kelautan dan perikanan yang cukup baik dan dapat dikembangkan. Maka perlu ditempuh langkah kongrit untuk memberdayakan usaha kelautan dan perikanan yang umumnya berbasis ekonomi lemah.

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah di dalam melaksanakan kedinasan, sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Urutan masing-masing pembagian struktur Dinas Perikanan dipimpin oleh kepala Dinas dibantu oleh antara lain:

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap;
 - b. Seksi Pengelolaan TPI dan Sumber Daya Ikan; dan
 - c. Seksi Teknologi Kenelayanan dan Perizinan.
3. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya, Perizinan dan Produksi Budidaya Ikan.
4. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana P2HP;
 - b. Seksi Teknologi Hasil Perikanan dan Pelaku Usaha; dan
 - c. Seksi Kelembagaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan, maka diaturlah tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan perikanan;
 - b. membantu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya perikanan berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perikanan.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan perikanan, penatausahaan keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor,

kehumasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan program/kegiatan, serta administrasi keuangan lingkup Dinas Perikanan agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja dinas;
- c. penghimpunan, penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kesejahteraan sosial;
- d. penganalisaan, pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dinas;
- e. menghimpun bahan kebijakan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- f. pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

- h. penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
- i. pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran;
- j. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan dinas;
- k. penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
- l. pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
- m. pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.

Untuk melaksanakan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - a. penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
 - c. pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan Lingkungan sekitarnya;
 - d. penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan bidang-bidang perikanan tangkap. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi, yaitu :
- a. melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Teknologi Penangkapan, Sarana dan Prasarana Serta Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- 3.1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana Perikanan Tangkap.

Untuk melaksanakan, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana dan Prasarana, meliputi : Perencanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten;
- b. bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta tempat pelelangan ikan kewenangan kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan 0 s/d 5 GT;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
- f. dukungan dalam penetapan standarisasi kelayakan kapal penangkap perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

- 3.2. Seksi Teknologi, Kenelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu kepala bidang perikanan tangkap dalam pengembangan, peningkatan

teknologi dan pengembangan sumberdaya nelayan serta pengelolaan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Teknologi, Kenelayanan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. merencanakan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan teknologi perikanan tangkap;
- b. pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kenelayanan menjadi andal;
- c. melakukan pengelolaan perizinan bidang perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3.3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas menyiapkan Membantu kepala bidang perikanan tangkap dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan dan sumber daya ikan.

Untuk melaksanakan, Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. merencanakan Langkah-langkah pengembangan dan peningkatan tempat pelelangan ikan;
- b. melakukan peningkatan dan pengelolaan sumber daya ikan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kebijakan perikanan Budidaya, agar dapat berdaya saing dan berdaya guna.

Untuk melaksanakan, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, ketersediaan pakan, peningkatan mutu induk dan bibit unggul, peningkatan usaha budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, perizinan, pengawasan produksi, serta pembinaan hama dan penyakit ikan;

- b. pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4.1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana Perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal sarana dan prasarana Budidaya Ikan (BDI);

- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4.2. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam peningkatan, pengembangan teknologi budidaya ikan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budidaya perikanan;
- b. melaksanakan kebijakan budidaya perikanan, pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut; pelaksanaan kebijakan mutu benih ikan, induk dan cara budidaya perikanan; dan pelaksanaan pelayanan usaha;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4.3. Seksi Sumberdaya, Perizinan dan Produksi Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam peningkatan sumberdaya, perizinan dan produksi budidaya ikan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sumberdaya, Perizinan dan Produksi Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. merencanakan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan sumberdaya ikan serta produksi budidaya ikan;
- b. melakukan pengelolaan perizinan bidang perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, agar dapat berdaya saing dan berdaya guna.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha hasil perikanan;
- b. pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- 5.1. Seksi Sarana dan Prasarana P2HP mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dalam peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana P2HP.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana P2HP menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal, standart, prosedur dan kriteria;
- b. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal sarana dan prasarana P2HP;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5.2. Seksi Teknologi Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan pelaku pengembangan teknologi hasil perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Teknologi Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal teknologi hasil perikanan;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5.3. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi kelembagaan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun program kegiatan bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan) secara berkelanjutan;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pemantapan pendidikan dan pelatihan serta akreditasi fungsional penyuluh;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani dalam memfasilitasi sarana, pra sarana serta pembiayaan;
- f. pelaksanaan penyusunan program kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- g. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kelembagaan penyuluhan dan akreditasi fungsional ketenagaan penyuluhan;
- h. pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh;

- i. pelaksanaan analisis kebutuhan tenaga penyuluh dan sistem informasi penyuluhan tentang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
 - j. pelaksanaan dan pembinaan penerapan standard dan prosedur sistem kerja penyuluhan bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - k. pelaksanaan dan pembinaan penerapan penilaian dan penyusunan angka kredit fungsional penyuluh;
 - l. pelaksanaan pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi fungsional penyuluh;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN
MUKOMUKO**

**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

KEPALA DINAS
JUNAIDI, S.P
Pembina Utama Muda /IVb
NIP. 19690621 199603 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 07 TAHUN 2019
TANGGAL 25 JANUARI 2019

SEKRETARIS
AM AZBAS NOVYAN, S.Pi., M.Si
Pembina /IVa
NIP. 19711116 199403 1 002

KETERANGAN
: GARIS PEMBINAAN
- - - - - : GARIS KOORDINASI

**ANALIS KEUANGAN PUSAT/
DAERAH**
ARI PURWANTO, SE
Penata/IIIc
NIP. 19800527 201101 1 003

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**
ROSMIATI
Penata Tk. I /III d
NIP. 19660812 198703 2 008

**KEPALA BIDANG PERIKANAN
TANGKAP**
WARSIMAN, S.Pt
Pembina /IVa
NIP. 19720322 200502 1 002

**KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA**
FITRA ZULIYATMI, S.Pt
Penata Tk. I/III d
NIP. 19800301 200404 2 011

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA PERIKANAN**
MEYLANI, S.TP
Penata Tk. I/III d
NIP. 19810512 200604 2 011

**KEPALA SEKSI SARANA DAN
PRASARANA PERIKANAN TANGKAP**



**PENGELOLA PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP**



ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
NIP. 19760312 200604 2 003
JONI KELANA PUTRA, S.Pi
Penata Tk.I/III d
NIP. 19760627 200502 1 003

**PENGELOLA EKOSISTEM LAUT
DAN PESISIR**
EMA MARDIANA, S.Pi
Penata Tk.I/III d
NIP. 19760427 200803 2 001

**KEPALA SEKSI S.D. PERIZINAN
DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN**
NOVIANSYAH, S.ST
Penata Muda Tk. I /III b
NIP. 19801115 201001 1 010

**PENGELOLA EKOSISTEM LAUT
DAN PESISIR**
NOVI YANTI, SP
Penata Tk. I/III d
NIP. 19681113 200312 2 002

**KEPALA SEKSI SARANA DAN
PRASARANA P2HP**

**KEPALA SEKSI
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN**
YUNITA AD, S.Pi
Penata Muda Tk. I/III b
NIP. 19810627 201502 2 001

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
ERZA WANDI, S.Pi
Penata Muda Tk. I/III b
NIP. 19850107 201502 1 001

UPTD

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan

Untuk melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dilengkapi dengan struktur organisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya sumber daya manusia terdiri dari berbagai jenis tingkat pendidikan, kedisiplinan ilmu dan golongan serta masa kerja. Sumber Daya Manusia terdiri antara lain:

2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah dan Golongan

Tabel 1: Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko berdasarkan tingkat pendidikan golongan;

Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah (Orang)
SLTA	-	-	-	-	-
D.I/D.II	-	-	1	-	1
D.III	-	1	-	-	1
S.I	-	-	22	-	22
S.II	-	-	-	2	2
Jumlah	-	1	22	2	25

2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

Tabel 2: Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko berdasarkan jumlah eselon;

NO	Jumlah Esselon	Kondisi saat ini	Kekurangan
1	IIa	-	-
2	IIb	1	-
3	IIIa	1	-
4	IIIb	3	1
5	IVa	12	-
Jumlah		17	1

2.3. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS

Tabel 3. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25
2	Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	6
3	Pegawai PPPK	0
4	Tenaga Suka Rela	34
5	Tenaga Penyuluh Bantu	5
Jumlah		70

2.4. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Table 4. Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	III/IV	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	4

3. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada BAB ini menguraikan latar belakang serta uraian singkat organisasi Dinas Perikanan serta organisasi yang ada.

BAB II. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam BAB ini menguraikan tentang Perencanaan Pembangunan, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam BAB ini disajikan capaian-capaian kinerja dan sasaran-sasaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi

Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk periode lima tahun adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) ”

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala daerah dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 - 2026	Tujuan Kepala Daerah
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) ”	“Meningkatnya perekonomian daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan infrastruktur ekonomi”

Misi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026	Sasaran Kepala Daerah
1. Menjadikan kabupaten mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;	"Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dalam perekonomian daerah"
2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;	
3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;	
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;	
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq;	

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan Isu Strategis Kabupaten Mukomuko, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
3. Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing;
4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan janji yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat

saat kampanye. Janji kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, sehingga dalam konteks pengukuran kinerja menggambarkan kinerja outcomes. Posisi penjabaran janji kerja dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang mengampu janji kerja tersebut. Adapun janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 adalah :

1. Membangun Sektor Ekonomi dengan Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Utama Penunjang Perekonomian;
2. Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) di Kabupaten Mukomuko;
3. Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa-Siswi SD–SMP dan Beasiswa Bagi Siswa Yang Berprestasi dan Tidak Mampu;
4. Pembangunan Rumah Adat dan Balai Adat Mukomuko;
5. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
6. Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Bibit Unggul;
7. Peningkatan Pelayanan Kelistrikan;
8. Pembangunan Sentra Ekonomi Kreatif;
9. Pemberdayaan Wira Usaha Pemula dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah;
10. Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Pegawai Sarak dan Pegawai Adat di Kabupaten Mukomuko;
11. Bantuan Rumah Ibadah;
12. Pengembangan E-Gov dan Penyediaan Internet gratis dan;
13. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah seperti tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran Kepala Daerah dengan Cascading Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DAERAH
CASCADING DINAS PERIKANAN**

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertakwa (Imtaq)						
MISI I	Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan						
Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya perekonomian daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan infrastruktur ekonomi	Persentase pemenuhan infrastruktur strategis	Meningkatnya meningkatnya pertumbuhan sector unggulan dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan sector pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB;	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan Budidaya Produksi Perikanan Tangkap
				Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan

2.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah strategi dan kebijakan. Strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana visi dan misi dan sasaran yang akan diwujudkan. Strategi yang disertai dengan arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Perikanan dalam pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)			
MISI I	Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi Perikanan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan dan perubahan perilaku keluarga pelaku usaha perikanan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 3. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan; 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan .
		Peningkatan akses permodalan dan kemudahan investasi	Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro bagi pelaku usaha	
		Peningkatan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan	Peningkatan kapabilitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi dan Sosialisasi perubahan perilaku	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Meningkatkan Implementasi SAKIP	Peningkatan SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

2.4. Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sebagai pedoman kinerja untuk mengaplikasikan Rencana Strategi 2016-2021 yang dijadikan perjanjian bersama sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan menyelenggarakan pemerintah, pembangunan serta pembinaan ke masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam target yang ingin dicapai satu tahun agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terfokus dan dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran yang akan dicapai.

Target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Dimana target kinerja ditingkat sasaran bertujuan mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi. Sedangkan target kinerja pada tingkat kegiatan bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Dinas Perikanan Tahun 2016-2020 (000.000 rupiah, Persen)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	1.022.817,02	1.075.248,19	1.135.486,91	1.196.879,28	1.238.162,00
2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mukomuko (Persen) menurut lapangan usaha	48,23	48,13	47,66	47,02	46,10

3	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan	4,21	5,13	5,60	5,14	4,17
---	---	------	------	------	------	------

Sumber Data : Mukomuko dalam Angka

Tabel 6. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan
Per 31 Desember 2021

No	Nama Indikator Kinerja Kunci	Target	Jumlah Realisasi
1	2	3	4
1.	Produksi Perikanan Tangkap	21.523 Ton/Tahun	21.808 Ton/Tahun
2.	Produksi Perikanan Budidaya	7.012 Ton/Tahun	7.012 Ton/Tahun
	Total	28.535 Ton/Tahun	28.820 Ton/Tahun

Rencana kinerja tahun 2021 juga memuat Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun Anggaran 2021 sebagai dukungan penting bagi Dinas Perikanan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah melalui strategis program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Target Penetapan Kinerja

Target kinerja tahun 2021 ini merupakan target kinerja pada tingkat sasaran strategis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan strategis daerah.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KET
	UTAMA	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Perikanan (ton)	20.408	23.800	24.500	25.200	28.535	
	➤ Perikanan Tangkap	18.700	22.000	22.500	22.900	21.523	
	➤ Perikanan Budidaya	1.708	1.800	2.000	2.300	7.012	
2	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	31,15	31,48	31,51	31,72	32,5	

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perikanan
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	KET
1	2	3	4	5
1	Produksi Perikanan (ton)	28.535	28.820	
	➤ Perikanan Tangkap	21.523	21.808	
	➤ Perikanan Budidaya	7.012	7.012	
2	Konsumsi Ikan (Kg / Kapita Tahun)	32,5	57,77	
3	Produksi Benih Ikan (ekor)	2.000.000	2.500.000	
4	Produksi Pengolahan Ikan (ton)	1.800	1.200.000	
5	Pendapatan Nelayan	1.600.000	1.500.000	
6	Pendapatan Pembudidaya	1.600.000	1.575.000	
7	Pendapatan Pengolahan /Pedagang Ikan	1.500.000	1.350.000	
8	Jumlah KUB	150	178	
9	Jumlah POKDAKAN	160	169	
10	Jumlah POKLASAR			
	➤ Pemasaran	30	134	
	➤ Pengolahan Penggaraman, pengasapan	30	57	

Ikhtisar target kinerja dan anggaran untuk masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel program kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 pada table Rencana Kinerja tahunan (RKT) sebagai berikut:

Tabel 9 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan
Tahun Anggaran 2021

Misi I. Menjadikan kabupaten mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	➤ Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen
	➤ Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen
	➤ Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
	➤ Jumlah Penerima Jasa Administrasi keuangan	23 Orang
	➤ Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
	➤ Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	5 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	18 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2 Jenis
	➤ Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Jenis
	➤ Jumlah Rapat-rapat Koordinasi	126 Kali, 15 Kali

	dan Konsultasi Ke Dalam Daerah ➤ Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	
	➤ Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit
	➤ Jumlah Penyediaan Jasa ➤ Surat Menyurat	321 Lembar
	➤ Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 Bulan
	➤ Jumlah Penyediaan Jasa ➤ Pelayanan Umum Kantor	35 Orang
	➤ Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Jenis
	➤ Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis
	➤ Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	
2. Meningkatnya produksi perikanan	➤ Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan	3 Jenis
	➤ Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan Kapal/Perahu) < 5 GT	4 Unit
	➤ Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan Mesin 15 PK	4 Unit
	➤ Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)	4 Unit
	➤ Jumlah Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	14 Unit
	➤ Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko	35 Kelompok
	➤ Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat	20 Kelompok

	➤ Jumlah Pengadaan Bibit ➤ Ikan Gurame	10.000 ekor
	➤ Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	4 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	8 Jenis
	➤ Jumlah Sarana dan Prasarana produksi Perikanan Budidaya	4 Jenis
	➤ Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir	3 Kali
	➤ Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk produk perikanan	2 Kali
	➤ Jumlah Pengendalian ➤ Mutu dan Higienis Ikan	6 Lokasi
	➤ Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan	2 Kali
	➤ Jumlah Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	5 Paket
	➤ Jumlah Pembinaan dan Validasi Data POKLAHSAR, POKDAKAN, KUB	15 Kelompok
	➤ Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok wanita nelayan	1 Jenis
	➤ Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan	4 Jenis

2. Target Penetapan Anggaran

Rencana target anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah yang dianggarkan Dinas Perikanan untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (APBD-P) yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dianggarkan sebesar Rp. 5.117.246.471,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.736.676.275,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 380.570.196,-. Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 4.677.656.141,-

Tabel 10. Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							Pagu	Sumber Dana
1	2					3	4	5
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.307.818.701	
I	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.773.284.009	
1	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.984.946	
	3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.984.990	DAU
	3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.956	DAU
2	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.902.625.933	
	3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.714.156.000	DAU
	3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.470.000	DAU
	3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.999.933	DAU
3	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.635.204	DAU
	3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.163.506	DAU

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							Pagu	Sumber Dana
1	2					3	4	5
	3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.996.972	DAU
	3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.982.959	DAU
	3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.988.000	DAU
	3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.705.672	DAU
	3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	DAU
	3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.998.095	DAU
	3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.000.000	DAU
4	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.419.818	
	3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.419.818	DAU
5	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.379.006	
	3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.380.000	DAU

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							Pagu	Sumber Dana
1	2					3	4	5
	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.999.006	DAU
	3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.000.000	DAU
6	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.239.102	
	3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.289.102	DAU
	3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.950.000	DAU
II	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	916.198.041	
1	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	899.799.783	
	3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	831.199.783	DAU/DAK
	3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	68.600.000	DAK
2	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.398.258	

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							Pagu	Sumber Dana
1	2					3	4	5
	3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	16.398.258	DAU
III	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	132.849.793	
1	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	132.849.793	
	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.849.793	DAU
IV	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.797.280	
1	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	48.797.280	
	3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	48.797.280	DAU
V	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	436.689.578	
1	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	14.499.918	
	3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.499.918	DAU
2	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	29.560.932	

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							Pagu	Sumber Dana
1	2					3	4	5
	3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	29.560.932	DAU
3	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	392.628.728	
	3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	392.628.728	DAU/DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan yang merupakan sistem sistematis dan berkesinambungan berupa bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan atau implementasi rencana strategis dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Akuntabilitas kinerja merupakan hasil yang diharapkan sejauh mana telah dirumuskan dalam rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan yang telah dicapai. Pertanggungjawaban ini dapat dipertanggungjawabkan melalui media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi tahapan pengukuran-evaluasi dan analisa kinerja kepada pihak-pihak yang berwenang yang menerima laporan/pemberi amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan berpedoman sesuai dengan aturan/ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran serta program/kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun tertentu.

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Tahap Pengukuran Kinerja merupakan tahap untuk mengukur capaian Kinerja dengan cara membandingkan rencana Kinerja dengan realisasi rencana kinerja dengan realisasinya pada akhir tahun. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya dengan standar yang ada serta sejauh mana visi dan misi tercapai.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan masing-masing indikator kerjanya. Capaian kinerja sasaran secara logika-apriori didasari dari hubungan sebab akibat sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai suatu sasaran.

Indikator kinerja yang di gunakan untuk mengukur kegiatan adalah input, output dan outcome.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan kelompok indikator antara lain:

a. Kelompok Indikator Masukan (Inputs) adalah :

✚ Segala sesuatu yang dibutuhkan agar melaksanakan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (outputs). Indikator Input yang digunakan terdiri dari atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah.

b. Kelompok Indikator Keluaran (Outputs) adalah :

✚ Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Kelompok Indikator Hasil (Outcomes) adalah:

✚ Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Kelompok manfaat (benefits) adalah:

✚ Merupakan kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

e. Dampak (Impacts) adalah:

✚ Kelompok tingkat ukuran pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

3.2 Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja

3.2.1 Pengukuran dan analisis kinerja

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan terdiri dari beberapa. Dari jumlah tersebut akan dievaluasi semuanya sebagai sasaran dan penunjang yang terkait dengan program yang dilaksanakan Dinas Perikanan di bidang kelautan dan perikanan. Sasaran tersebut terdiri dari 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dibidang peningkatan sarana/prasrana, produksi dan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran dari program dan kegiatan dengan gambaran beberapa indikator sasaran yang ditetapkan angka capaian kinerja rata-rata sebesar 100 % yang mempunyai makna BAIK. Adapun sasaran indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD.

Capaian kinerja/hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran telah ditetapkan untuk Dinas Perikanan pada lampiran formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) di bawah ini:

Tabel 11 : PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO (APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Output	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan	Dokumen	3	3	100	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
			b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Output	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
			2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Output	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
			b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)		Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Output	Jumlah Penerima Jasa Administrasi keuangan	Orang	23	23	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			Output	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Output	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Output	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	25	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)		Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Output	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	Jenis	18	18	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Output	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	4	4	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			e Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			Output	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	6	6	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			Output	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis	2	2	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			g Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu					
			Output	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis	10	10	100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)		Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			h	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Output	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	126	126	100
				Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	15	15	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Output	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Output	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	321	321	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Output	Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bulan	12	12	100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)		Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Output	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	35	35	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Output	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jenis	2	2	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Output	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	4	4	100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
II	Meningkatnya Produksi Perikanan	II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)		Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Output	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)	Jenis	5	5	100
			Outcome	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820	101
			b	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
			Output	Jumlah Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Unit	14	14	100
			Outcome	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820	101
			III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			Output	Jumlah Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Ekor	3.200	3.200	100
				Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	Jenis	4	4	100
				Jumlah Sarana dan Prasarana produksi Perikanan Budidaya	Jenis	4	4	100
			Outcome	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.012	7.012	100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
		a	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					
			Output	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir	Kali	3	3	100
			Outcome	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820	101
		V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					
		a	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Output	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk produk perikanan	Kali	1	1	100
			Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita/Tahun)	32,5	57,77	178
			2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					
			Output	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan	Lokasi	6	0	0	
			Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita/Tahun)	32,5	57,77	178	
			3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
			a	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Output	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan	Unit	2	2	100	
			Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita/Tahun)	32,5	57,77	178	

Tabel 12. Evaluasi dan Analisis Kinerja APBD-P Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.820.047.316	3.479.065.630	91,7	
			1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.984.946	28.318.250	78,69	
			2.								
			a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.984.990	23.662.000	91,06
			Output	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan	Dokumen	3	3				100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100				100
			b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9.999.956	4.656.250	46,56
			Output	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2				100
Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100				100			

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.916.169.933	2.678.629.032	91,85
			a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.734.500.000	2.497.785.032	91,34
			Output	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12			100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100
			b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					174.670.000	173.870.000	99,54
			Output	Jumlah Penerima Jasa Administrasi keuangan	Orang	23	23			100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100
			c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6.999.933	6.974.000	99,63
			Output	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1			100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			3.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.854.511	160.525.150	74,71
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.421.813	2.311.000	35,99
				Output	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5		100
				Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.996.972	18.951.200	99,76
				Output	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	25		100
				Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.996.972	18.951.200	99,76
				Output	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	Jenis	18	18		100
				Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.988.000	12.718.000	97,92
			Output	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	4	4		100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			e	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.705.672	17.697.750	99,96
			Output	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	6	6		100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			19.00.000	16.615.000	83,91
			Output	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis	2	2		100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			g	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			5.998.095	5.779.300	96,35

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Output	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis	10	10		100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			h	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.961.000	74.900.400	61,92
			Output	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	126	126		100
				Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	15	15		
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.419.818	26.150.000	95,37
			a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.419.818	26.150.000	95,37
			Output	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4		100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					542.379.006	502.943.660	92,73
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.380.000	1.380.000	100
			Output	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	321	321			100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100
			b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.999.006	66.563.660	70,07
			Output	Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bulan	12	12			100
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100			100
			c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				446.000.000	435.000.000	97,53
			Output	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	35	35			100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100	
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					83.239.102	82.499.538	99,11
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.289.102	71.229.538	99,92
			Output	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jenis	2	2		100	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100	
			b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.950.000	11.270.000	94,31
			Output	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	4	4		100	
			Outcome	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100	
II	Meningkatnya Produksi Perikanan	II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					664.453.783	614.742.390	92,52
			1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					664.453.783	614.742.390	92,52

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			595.853.783	546.597.390	91,73
			Output	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)	Jenis	5	5		100
			Outcome	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820		101
			b	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			68.600.000	68.145.000	99,34
			Output	Jumlah Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Unit	14	14		100
			Outcome	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820		101
		III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				191.469.364	161.347.641	84,27
			1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				191.469.364	161.347.641	84,27
			a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			191.469.364	161.347.641	84,27
			Output	Jumlah Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Ekor	3.200	3.200		100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	Jenis	4	4		100
					Jumlah Sarana dan Prasarana produksi Perikanan Budidaya	Jenis	4	4		100
			Outcome		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.012	7.012		100
		IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					48.797.280	46.012.000	94,29
			1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					48.797.280	46.012.000	94,29
			a	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				48.797.280	46.012.000	94,29
			Output		Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir	Kali	3	3		100
			Outcome		Produksi perikanan tangkap	Ton	21.523	28.820		101
		V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					392.478.728	376.488.480	95,93

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					1.350.000	1.350.000	100,00
			a Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.350.000	1.350.000	100,00
			Output	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk produk perikanan	Kali	1	1			100
			Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita /Tahun)	32,5	57,77			178
			2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					0	0	0
			a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					0	0	0
			Output	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan	Lokasi	6	6	0	0	0
			Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita /Tahun)	32,5	57,77	0	0	100

No	Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Indikator/Tolak Ukur Kinerja)	Satuan	Target	Realisasi Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					391.128.728	375.138.480	95,91
			a	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				391.128.728	375.138.480	95,91
				Output	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan	Unit	2	2		100
				Outcome	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita /Tahun)	32,5	57,77		178

3.2.2. Kesimpulan Hasil Evaluasi

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan tahun anggaran 2021 diperoleh beberapa kegiatan yang dinilai lebih efisien, khususnya dalam penggunaan biaya berbanding dengan rencana awal biaya kegiatan. Dengan hasil target tetap terpenuhi maksimal. Disamping efektifitas kinerja kegiatan juga efektifitas disegi sasaran, yang mana dilakukan dengan memperbandingkan outcome dengan outputnya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 diperoleh efektifitas dari setiap kegiatan dengan ditandai berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome yang mencapai 91,41%.

3.3. Akuntabilitas Laporan Keuangan

3.3.1. Perbandingan Realisasi dengan Target Rencana Anggaran Biaya

Penilaian terhadap akuntabilitas laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 adalah dengan membandingkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran hasil perbandingan tersebut di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13: Perbandingan Realisasi dengan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Menurut APBD–Perubahan

No	KODE REKENING APBN/APBD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		REALISASI			Sisa Pagu
			Pagu	Total	Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)	
					Rp	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.820.047.316	3.820.047.316	3.479.065.630	91.07	100	340.981.686
								-
	3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.984.946	35.984.946	28.318.250	78.69	100	7.666.696
	3.25.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.984.990	25.984.990	23.662.000	91.06	100	2.322.990
		- Belanja Pegawai	16.750.000	16.750.000	16.750.000	100.00	100	-
		- Belanja Barang dan Jasa	9.234.990	9.234.990	6.912.000	74.85	100	2.322.990
	3.01.3.01.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.956	9.999.956	4.656.250	46.56	100	5.343.706
		- Belanja Barang dan Jasa	9.999.956	9.999.956	4.656.250	46.56	100	5.343.706
	3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.916.169.933	2.916.169.933	2.678.629.032	91.85	100	237.540.901
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.500.000	2.734.500.000	2.497.785.032	91.34	100	236.714.968

	3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	174.670.000	174.670.000	173.870.000	99.54	100	800.000
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.999.933	6.999.933	6.974.000	99.63	100	25.933
		- Belanja Pegawai	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100.00	100	-
		- Belanja Barang dan Jasa	4.349.933	4.349.933	4.324.000	99.40	100	25.933
	2.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.854.511	214.854.511	160.525.150	74.71	100	54.329.361
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.421.813	6.421.813	2.311.000	35.99	100	4.110.813
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.996.972	18.996.972	18.951.200	99.76	100	45.772
	3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.982.959	11.982.959	11.552.500	96.41	100	430.459
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.988.000	12.988.000	12.718.000	97.92	100	270.000
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	17.705.672	17.705.672	17.697.750	99.96	100	7.922
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	19.800.000	19.800.000	16.615.000	83.91	100	3.185.000
	3.25.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.998.095	5.998.095	5.779.300	96.35	100	218.795

	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.961.000	120.961.000	74.900.400	61.92	100	46.060.600
								-
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	27.419.818	27.419.818	26.150.000	95.37	100	1.269.818
	3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.419.818	27.419.818	26.150.000	95.37	100	1.269.818
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	542.379.006	542.379.006	502.943.660	92.73	100	39.435.346
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.380.000	1.380.000	1.380.000	100.00	100	-
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa .Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	94.999.006	94.999.006	66.563.660	70.07	100	28.435.346
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446.000.000	446.000.000	435.000.000	97.53	100	11.000.000
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	83.239.102	83.239.102	82.499.538	99.11	100	739.564
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.289.102	71.289.102	71.229.538	99.92	100	59.564
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.950.000	11.950.000	11.270.000	94.31	100	680.000
								-

II.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	664.453.783	664.453.783	614.742.390	92.52	100	49.711.393
								-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa : dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	664.453.783	664.453.783	614.742.390	92.52	100	49.711.393
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	595.853.783	595.853.783	546.597.390	91.73	100	49.256.393
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	68.600.000	68.600.000	68.145.000	99.34	100	455.000
								-
III.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	191.469.364	191.469.364	161.347.641	84.27	100	30.121.723
								-
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	191.469.364	191.469.364	161.347.641	84.27	100	30.121.723
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan, Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	191.469.364	191.469.364	161.347.641	84.27	100	30.121.723
IV.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.797.280	48.797.280	46.012.000	94.29	100	2.785.280
								-

	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai.Danau. Waduk. Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	48.797.280	48.797.280	46.012.000	94.29	100	2.785.280
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai.Danau. Waduk.Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota	48.797.280	48.797.280	46.012.000	94.29	100	2.785.280
								-
V.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	392.478.728	392.478.728	376.488.480	95.93	100	15.990.248
								-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100.00	100	-
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/kota	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100.00	100	-
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Skala Mikro dan Kecil	0	0	0	0	0	0
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standart pada usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0	0	0		0	0

	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Saerah Kabupaten/Kota	391.128.728	391.128.728	375.138.480	95.91	100	15.990.248
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	391.128.728	391.128.728	375.138.480	95.91	100	15.990.248
	TOTAL		5.117.246.471	5.117.246.471	4.677.656.141	91.41	100	439.590.330

3.3.2. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu

Table 14: Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan tahun-tahun lalu

No	Uraian Belanja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.585.167.000,-	1.458.557.539,-	92,01	1.477.490.000,-	1.471.371.133,-	99,59	2.167.850.000,-	2.101.229.679,-	97	2.314.859.000,-	2.150.098.994,-	92,88	0	0	0

2	Belanja Langsung	4.763.165.745,-	4.356.115.916,-	91,45	4.561.607.750,-	4.314.538.097,-	94,58	4.086.535.500,-	3.409.919.637,-	83,44	2.387.832.200,-	1.916.988.067,-	80,28	0	0	0
3	Belanja Pegawai	462.533.500,-	431.558.500,-	93,30	343.625.000,-	341.820.000,-	99,47	2.693.420.000,-	2.602.074.679,-	96,6	514.350.000,-	384.975.000,-	74,84	2.909.170.000,-	2.671.655.032,-	91,84
4	Belanja Barang dan Jasa	4.200.632.245,-	3.825.384.416,-	91,07	3.921.021.750,-	3.680.377.372,-	93,86	2.818.410.500,-	2.472.503.987,-	87,72	1.587.185.000,-	1.305.715.867,-	82,26	1.152.406.275,-	993.236.123,-	86,19
5	Belanja Modal	100.000.000,-	99.173.000,-	99,17	296.961.000,-	292.340.725,-	98,44	742.555.000,-	436.570.650,-	58,79	286.297.200,-	226.297.200,-	79,04	380.570.196,-	374.578.830,-	98,43
6	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.100.000	638.186.156,-	94,53
TOTAL		6.348.332.745,-	5.814.673.455,-	91,59	9.687.306.900,-	6.039.097.750,-	94,58	6.254.385.500	5.511.149.316	88,11	4.702.691.200	4.067.087.061	86,48	5.117.246.471	4.677.656.141	91,41

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko mencoba mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan khususnya, visi dan misi Kabupaten Mukomuko secara umum, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat digunakan sebagai pemicu bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah disepakati bersama. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan seluruh masyarakat dan stakeholder mendapatkan informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Kami selalu berikhtiar untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun.

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam kapasitas instansi teknis di sektor kelautan dan perikanan senantiasa berupaya semaksimal mungkin bermodal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki masing-masing bidang/bagian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dan sumber anggaran yang ada dalam melaksanakan suatu cerminan efisiensi dan efektifitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perikanan yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan dalam mewujudkan tujuan Otonomi Daerah secara khusus dan tujuan Negara pada umumnya. Keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan wujud nyata dalam mengimplentasikan visi dan misi Dinas Perikanan.

4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati, Dinas Perikanan tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam segala aspek merupakan tolak ukur dalam pencapaian sasaran dari tujuan visi dan misi. Salah satu penyebab permasalahan yang terjadi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas sumberdaya manusia baik tenaga struktural maupun fungsional;
2. Sarana prasarana yang belum memadai;
3. Masih rendahnya Kapasitas Sumberdaya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan;
4. Keterbatasan Pagu Anggaran yang tersedia.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya penanganan masalah ada beberapa faktor:

1. Memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk melaksanakan pelaksanaan target kinerja dan mengusulkan penambahan jumlah SDM;
2. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar
3. Melakukan pembinaan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan secara intensif;
4. Mengusulkan penambahan Pagu Anggaran.

Secara umum, hasil pengukuran kinerja tahun 2021 dimana target pelaksanaannya dapat dicapai dengan baik. Untuk pencapaian target ini tidak terlepas dari kualitas indikator kinerja yang digunakan dimana indikator outcome yang digunakan adalah outcome yang sangat dekat dengan output atau immediate output.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko telah mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Laporan ini dapat dijadikan pemicu bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sudah disepakati bersama.

Mukomuko, Maret 2022



Kepala Dinas,

JUNAIDI, SP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19690621 199603 1 006

LAMPIRAN

**FOTO REKAM JEJAK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BAJU PELAMPUNG

PERUSAHAAN : TOKO PRIMA JAYA

LOKASI : BENGKULU

WAKTU : 07-07-2021 s.d 05-08-2021

PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK : Rp. 7.337.000

SUMBER DANA : DAK 2021

	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>



FOTO KONDISI (100%)

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN JARING 2 INCHI

PERUSAHAAN : CV. ENAM SAUDARA

LOKASI : MUKOMUKO

WAKTU : 09-07-2021 s.d 06-10-2021

PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK : Rp. 73.893.000

SUMBER DANA : DAK 2021



FOTO KONDISI (100%)

	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN PERAHU/KAPAL LEBIH KECIL DARI 3 GT

PERUSAHAAN : CV. BINTANG MINAMARIN

LOKASI : PADANG SUMATERA BARAT

WAKTU PELAKSANAAN : 09-07-2021 s.d 10-10-2021

NILAI KONTRAK : Rp. 131.703.000

SUMBER DANA : DAK 2021

	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN GPS DAN FISH FINDER


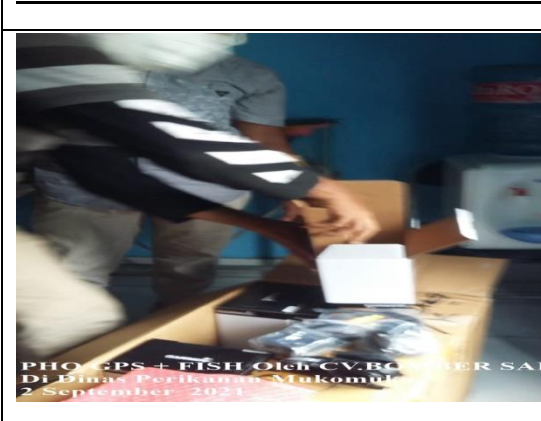

PERUSAHAAN : CV.BOMBER SAKTI

LOKASI : MUKOMUKO

WAKTU PELAKSANAAN : 09-07-2021 s.d 06-09-2021

NILAI KONTRAK : Rp. 68.145.000

SUMBER DANA : DAK 2021

	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN MESIN 15 PK

PERUSAHAAN : PT. SEJATI UNGGUL PERSADA

LOKASI : PADANG SUMATERA BARAT

WAKTU PELAKSANAAN : 05-07-2021 s.d 03-09-2021

NILAI KONTRAK : Rp. 97.000.000

SUMBER DANA : DAK 2021



FOTO KONDISI (100%)



FOTO KONDISI (100%)



FOTO KONDISI (100%)

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN JARING 5,5 INCHI

PERUSAHAAN : CV. SABOJU

LOKASI : MUKOMUKO

WAKTU PELAKSANAAN : 28-06-2021 s.d 24-09-2021

NILAI KONTRAK : Rp. 196,673,000

SUMBER DANA : DAK 2021



FOTO KONDISI (100%)

	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>
	<p>FOTO KONDISI (100%)</p>

NAMA INSTANSI : **DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO**

NAMA KEGIATAN : **REHABILITASI PASAR IKAN KOTA MUKOMUKO**

PERUSAHAAN : **CV. ABDATI MANDIRI**

LOKASI : **MUKOMUKO**

WAKTU PELAKSANAAN : **09-07-2021 s.d 05-11-2021**

NILAI KONTRAK : **Rp. 199.621.000**

SUMBER DANA : **DAK 2021**

 <p>pasar ikan Koto Jaya Mukomuko 2°35'54", 101°7'15", 4.9m, 71 2020-06-25 15:49:28</p>	<p>FOTO KONDISI SEBELUM DIBANGUN (0%)</p>
	<p>FOTO KONDISI DIBANGUN (50%)</p>
	<p>FOTO KONDISI DIBANGUN (100%)</p>

NAMA INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NAMA KEGIATAN : REHABILITASI PASAR IKAN PENARIK

PERUSAHAAN : CV. DARA SAUDARA

LOKASI : MUKOMUKO

WAKTU PELAKSANAAN : 09-07-2021 s.d 05-11-2021

NILAI KONTRAK : Rp. 99.369.000

SUMBER DANA : DAK 2021

 <p>Pasar ikan SP1 Desa Lubuk Mukti Penarik -2°37'11", 101°21'22", 99,4m, 189° 2020-06-16 12:01:53</p>	<p>FOTO KONDISI SEBELUM DIBANGUN (0%)</p>
	<p>FOTO KONDISI DIBANGUN (50%)</p>
	<p>FOTO KONDISI DIBANGUN (100%)</p>

KEGIATAN PENUNJANG

NAMA INSTANSI	:	DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
NAMA KEGIATAN	:	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (Penugasan)
PELAKSANA	:	TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
LOKASI	:	MUKOMUKO
WAKTU PELAKSANAAN	:	19-04-2021 s.d 31-12-2021
NILAI PAGU	:	Rp. 17.345.000
REALISASI	:	Rp. 15.025.000
SUMBER DANA	:	DAK 2021

NAMA INSTANSI	:	DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
NAMA KEGIATAN	:	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PERAHU/KAPAL
PERUSAHAAN	:	PT. YAKIN TRAFINDO KONSULTAN

LOKASI	:	PADANG SUMATERA BARAT
WAKTU PELAKSANAAN	:	06-04-2021 s.d 30-04-2021
NILAI KONTRAK	:	Rp. 7.495.950
SUMBER DANA	:	DAK 2021

NAMA INSTANSI	:	DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
NAMA KEGIATAN	:	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI PASAR IKAN PENARIK
PERUSAHAAN	:	CV. KARYA KREASI KONSULTAN
LOKASI	:	MUKOMUKO
WAKTU PELAKSANAAN	:	03-06-2021 s.d 09-06-2021
NILAI KONTRAK	:	Rp. 7.353.940
SUMBER DANA	:	DAK 2021

NAMA INSTANSI	:	DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
---------------	---	------------------------------------

NAMA KEGIATAN	:	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI PASAR IKAN KOTA MUKOMUKO
PERUSAHAAN	:	CV. KARYA KREASI KONSULTAN
LOKASI	:	MUKOMUKO
WAKTU PELAKSANAAN	:	03-06-2021 s.d 09-06-2021
NILAI KONTRAK	:	Rp. 9.659.265
SUMBER DANA	:	DAK 2021

KEGIATAN PENGADAAN PAKAN IKAN TAHUN 2021





KEGIATAN PENGADAAN BENIH GURAME TAHUN 2021

